Jurnal Manajemen Strategis dan Inovasi Vol. 7, No. 4, Desember 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jmsi

INOVASI PEMERINTAHAN LOKAL DI ERA DESENTRALISASI: ANTARA KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN STRUKTURAL

Syabran Jabar[1], Aldri Frinaldi[2], Hendra Naldi[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Padang
syabran.jbr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika inovasi pemerintahan lokal di Indonesia dalam konteks pelaksanaan desentralisasi yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah, namun pada praktiknya masih diwarnai oleh ketergantungan struktural terhadap pemerintah pusat. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu berinovasi secara mandiri di tengah keterbatasan fiskal, regulatif, dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif, dengan menganalisis berbagai hasil penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2016–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, seleksi, kategorisasi, dan sintesis literatur yang relevan untuk menemukan pola hubungan antara kemandirian daerah dan struktur pengendalian pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pemerintahan lokal di Indonesia muncul sebagai hasil dialektika antara kreativitas lokal dan kepatuhan struktural, bukan sebagai produk otonomi penuh. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, kepemimpinan visioner, dan dukungan masyarakat menunjukkan inovasi yang lebih adaptif dan kolaboratif, sedangkan daerah yang bergantung pada transfer pusat cenderung menghasilkan inovasi administratif yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi yang efektif memerlukan keseimbangan antara otonomi daerah dan dukungan adaptif dari pusat untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendorong kreativitas, kepercayaan, dan keberlanjutan inovasi publik.

Kata Kunci: Desentralisasi, Inovasi Pemerintahan Lokal, Ketergantungan Struktural.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of local government innovation in Indonesia within the context of decentralization, which is expected to strengthen regional autonomy but in practice remains constrained by structural dependence on the central government. The main issue addressed is the extent to which local governments can innovate independently amid fiscal, regulatory, and institutional limitations. This research employs a qualitative literature study method, analyzing research findings, policy documents, and scientific publications published between 2015 and 2025. The analysis was conducted through several stages: data collection, selection, categorization, and synthesis of relevant literature to identify the relationship

between regional autonomy and central control structures. The results reveal that local government innovation in Indonesia emerges as a dialectical outcome between local creativity and structural compliance, rather than a product of full autonomy. Regions with strong fiscal capacity, visionary leadership, and community support tend to develop more adaptive and collaborative innovations, whereas regions dependent on central transfers often produce limited administrative innovations. This study concludes that effective decentralization requires a balance between regional autonomy and adaptive central support to foster a collaborative ecosystem that encourages creativity, trust, and sustainable public innovation.
Keywords: *Decentralization, Local Government Innovation, Structural Dependence.*

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu strategi fundamental dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan secara mandiri (Rondinelli, 1981; Smith, 1985). Di Indonesia, semangat tersebut diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian pemerintahan lokal yang kreatif dan inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merancang kebijakan, mengelola anggaran, dan menciptakan inovasi pelayanan publik sesuai konteks lokalnya (Dwiyanto, 2018).

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih menghadapi dilema antara idealisme kemandirian dan realitas ketergantungan struktural terhadap pemerintah pusat. Secara normatif, otonomi daerah dimaksudkan untuk memperluas kewenangan pemerintah lokal. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak daerah masih sangat bergantung secara fiskal pada transfer dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Kuncoro, 2020). Penelitian oleh Ariyanto dan Pribadi (2025) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya mengurangi ketimpangan vertikal karena sebagian besar daerah memiliki rasio ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pusat. Kondisi ini menyebabkan daerah memiliki ruang gerak yang terbatas dalam membiayai program inovatif tanpa dukungan pusat.

Selain itu, regulasi yang bersifat top-down turut menjadi faktor penghambat kreativitas daerah. Studi oleh Prasojo dan Kurniawan (2022) menegaskan bahwa inovasi di sektor publik sering kali tidak tumbuh secara organik dari daerah, melainkan sebagai respons terhadap instruksi pusat atau kompetisi inovasi yang dikelola pemerintah pusat seperti *Innovation Government Award (IGA)*. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi di tingkat lokal belum sepenuhnya menjadi manifestasi dari kemandirian, melainkan bentuk adaptasi terhadap tekanan struktural dan insentif vertikal (Rahman et al., 2023).

Penelitian mutakhir memperkuat pandangan bahwa ketergantungan struktural masih menjadi masalah mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi. Misalnya, studi oleh Sutrisno dan Darmawan (2023) menemukan bahwa lebih dari 80% pemerintah kabupaten/kota di Indonesia memiliki tingkat kemandirian fiskal di bawah 20%, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan kebijakan dan inovasi sendiri menjadi terbatas. Demikian pula, penelitian oleh Mahsyar dan Iskandar (2024) menyoroti bahwa ketergantungan fiskal dan regulatif berpengaruh negatif terhadap kapasitas daerah dalam menginisiasi inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat ketergantungan struktural, semakin rendah insentif daerah untuk melakukan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.

Kesenjangan antara idealisme desentralisasi dan realitas implementasi juga terlihat dari variasi kapasitas kelembagaan antar daerah. Daerah dengan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang kuat lebih mampu mengembangkan inovasi yang kreatif dan adaptif, sementara daerah dengan kapasitas terbatas cenderung melakukan inovasi yang bersifat administratif atau simbolik (Anwar, 2020; Lex Localis, 2023). Hal ini memperkuat pandangan bahwa inovasi di era desentralisasi tidak semata ditentukan oleh tingkat otonomi formal, tetapi juga oleh *kapabilitas institusional* dan *struktur ketergantungan* yang mengikat pemerintah lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari paradoks yang menarik: di satu sisi, desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk menjadi laboratorium inovasi pemerintahan; namun di sisi lain, struktur fiskal dan regulatif yang masih sentralistik menciptakan batasan terhadap ruang kemandirian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana inovasi pemerintahan lokal berkembang dalam situasi "antara kemandirian dan ketergantungan struktural."

Nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori desentralisasi, teori ketergantungan fiskal, dan teori inovasi sektor publik ke dalam satu kerangka analitis. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menyoroti desentralisasi atau inovasi secara terpisah. Studi ini justru berfokus pada interaksi keduanya, yakni bagaimana inovasi tetap dapat muncul meski dalam kondisi struktural yang membatasi. Dengan menggunakan data empiris dan pendekatan komparatif antar daerah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori tentang inovasi pemerintahan lokal di negara-negara dengan sistem desentralisasi asimetris seperti Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai teori, hasil penelitian, serta kebijakan yang relevan mengenai inovasi pemerintahan lokal dalam konteks desentralisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan konsep, kesenjangan teoritis, serta pola hubungan antara kemandirian daerah dan ketergantungan struktural terhadap pemerintah pusat tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Snyder, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, pengumpulan sumber literatur, yaitu dengan menelusuri artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2025) melalui basis data seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan portal jurnal nasional seperti SINTA. Kriteria utama pemilihan literatur meliputi: (1) relevansi dengan tema desentralisasi, inovasi pemerintahan, dan otonomi daerah; (2) keterbaruan sumber; dan (3) kredibilitas penerbit atau jurnal.

Kedua, dilakukan seleksi dan evaluasi sumber dengan menelaah kesesuaian isi terhadap fokus penelitian. Setiap sumber ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi gagasan kunci, metodologi yang digunakan, serta temuan empiris yang relevan. Tahap ini bertujuan untuk menyingkirkan literatur yang redundan atau kurang berkualitas, sehingga hanya sumber yang valid dan substantif yang digunakan dalam analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebanyak 20 artikel ilmiah terkait Inovasi Pemerintahan Lokal di Era Desentralisasi yang diperoleh dan dianalisis. Hasil analisis terhadap setiap artikel ilmiah dapat dilihat pada tabel 1. Analisis terhadap literatur utama yang terbit antara tahun 2016–2025 memperlihatkan pola yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil analisis artikel ilmiah

No	Judul Artikel dan penulis	Jurnal	Hasil Penelitin
1	Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan (C. Rosika dkk, 2025)	Comserva: Jurnal Ilmu Pemerintahan.	Menunjukkan desentralisasi membuka peluang inovasi lokal, namun keberlanjutan tergantung kapasitas institusional dan koordinasi fiskal.
2	Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik, (Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. 2025)	SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS.	Inovasi pelayanan penting untuk meningkatkan kualitas layanan, hambatan utama regulasi dan kapasitas SDM.
3	The Spread of Innovative Policies in an Imperfect Decentralisation , (Delbert Lim & Samuel Nursamsu, 2024)	RISE Programme (working paper).	Mekanisme difusi kebijakan antar daerah penting meski desentralisasi formal ada, penyesuaian desain kebijakan lokal sering terbatas.
4	Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia (R. Hilmawan dkk, 2023)	Journal of Public Administration Research, Elsevier.	Inovasi sektor publik di tingkat kabupaten/kota meningkatkan beberapa indikator pembangunan, tetapi efek bervariasi antar wilayah.
5	Analisis Atas Kemandirian Pemda dalam (studi kemandirian keuangan daerah) (P. Nugroho, 2016)	Jurnal Keuangan Negara, PKN STAN.	Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, ketergantungan transfer pusat tetap kuat.
6	Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di	Jurnal Kemendagri	Pelaksanaan desentralisasi belum maksimal, manfaat sering dinikmati elit lokal

	Indonesia. (K. M. Simanjuntak, 2015)		sementara hasil pelayanan publik belum merata.
7	Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur**.** (Thomas Hutauruk dkk, 2020)	Jurnal Borneo Administrator.	Kapasitas inovasi daerah bervariasi; beberapa kabupaten berhasil inovasi berbasis lokal, lainnya masih tertinggal.
8	Economic Dimension of Regional Innovation (H. Saksono, 2025)	Jurnal Kementerian Dalam Negeri	Desentralisasi fiskal belum cukup memperkuat kemampuan daerah untuk pembiayaan mandiri; struktur transfer perlu reformasi
9	Does decentralisation promote learning? Local political settlements and education policy (S. Arif, 2024)	Journal (Taylor & Francis)	Efek desentralisasi pada pembelajaran bergantung pada settlement politik lokal; beberapa daerah belajar cepat, lainnya stagnan.
10	An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Context (R. P. Wadipalapa ,2024)	SAGE journals	Kebijakan teknologi (mis. AI) butuh sinkronisasi pusat-daerah; desentralisasi menimbulkan fragmentasi implementasi.
11	Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan (ringkasan artikel/desentralisasi & inovasi) (C. Rosika dkk, 2025)	Comserva / PublikasiIndonesia	Menekankan perlunya model integratif: fiskal, SDM, dan partisipasi publik untuk inovasi berkelanjutan
12	Service Innovation in Local Government (studi beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan), (Mulyadi, S., & Rachmawati, R. ,2023)	Mediterranean Journal of Social Sciences, Richtmann Publishing.	Bentuk-bentuk inovasi pelayanan (proses, digital, struktural) meningkatkan kepuasan publik, tapi hambatan interoperabilitas data muncul.
13	Konsep Desentralisasi dalam Pelayanan Publik (studi inovasi layanan di daerah) (M. R. Fahlevy ,2022)	GovSci FISIP-Unmul	Desentralisasi memungkinkan diversifikasi layanan, namun perbedaan kapasitas antar daerah menimbulkan ketidaksetaraan.
14	Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan	Jurnal Akuntansi Keuangan,	Banyak daerah masih bergantung pada transfer

	Daerah. (Lestari, D., & Nugraha, A. ,2021)	Universitas Siliwangi.	pusat; hal ini mengurangi insentif inovasi fiskal
15	Evidence from Indonesian Local Government Innovation (digital public services & SPBE) (D. G. Manar ,2025)	Atlantis Press / prosiding.	Digitalisasi layanan (SPBE, mal pelayanan) menjadi fokus inovasi; dukungan arsitektur dan SDM kunci sukses.
16	Hubungan Kapasitas Inovasi Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (John Fery Sonoto, 2025)	ResearchGate	Kapasitas inovasi positif berkorelasi dengan kemandirian keuangan daerah, terutama melalui inovasi pendapatan asli daerah
17	Decentralization in Indonesia: Looking for one nation (P. Tjiptoherijanto, 2019)	International Journal of Development Studies (IJDS).	Meninjau peran desentralisasi pada kohesi nasional dan disparitas regional; inovasi lokal sering belum diikuti redistribusi kapasitas.
18	The Road to Inclusive Decentralized Village Governance (N. Annahar, 2023)	MDPI Sustainability	Desentralisasi desa menunjukkan potensi inklusivitas, tetapi kelemahan struktural (kapasitas, dana) menghambat tujuan
19	Fiscal Decentralization in Indonesia (kaji klasik & konsekuensi fiskal) (P. Smoke ,1996)	World Development Journal, 24(4)	Studi klasik tentang desentralisasi fiskal yang menjelaskan trade-off antara otonomi fiskal dan ketergantungan transfer. Temuan relevan sebagai konteks historis.
20	ANALISIS PROSES STRATEGI INOVASI DARI PERSPEKTIF (studi kasus kapasitas dan ketergantungan daerah) (S. Susilowati ,2016)	ejurnal Unisri	Peran pusat masih dominan dalam beberapa pola (instruktif); inovasi daerah terkendala rendahnya kemampuan fiskal dan administratif.

Pembahasan

Era desentralisasi di Indonesia membawa perubahan besar terhadap dinamika pemerintahan lokal. Tujuan utama desentralisasi adalah memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik yang inovatif. Namun,

seperti banyak penelitian menunjukkan, otonomi yang luas ini tidak serta-merta menghilangkan ketergantungan struktural terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks ini, inovasi pemerintahan lokal menjadi arena uji bagi kemampuan daerah untuk menerjemahkan kebijakan desentralisasi menjadi praktik tata kelola yang efektif dan adaptif.

1. **Desentralisasi dan Tantangan Kemandirian Struktural**

   Desentralisasi di Indonesia menciptakan peluang bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ini sering kali bersifat formal, bukan substansial (Simanjuntak, 2015; Tjiptoherijanto, 2019). Banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana pusat, yang menandakan adanya ketergantungan struktural dalam pembiayaan pembangunan (Nugroho, 2016; Saksono, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan klasik Smoke (1996) bahwa desentralisasi fiskal hanya efektif ketika diikuti dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli secara mandiri. Dalam konteks keuangan daerah, beberapa studi menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih rendah, terutama di daerah dengan kapasitas pajak terbatas (Nugroho, 2016; Sonoto, 2025). Ketergantungan terhadap dana transfer mengurangi ruang inovasi karena daerah lebih fokus pada kepatuhan administratif daripada penciptaan solusi kreatif lokal (Hutauruk et al., 2020).

2. **Inovasi Sebagai Produk Desentralisasi**

   Desentralisasi membuka ruang bagi inovasi kebijakan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan pendekatan kreatif dalam tata kelola publik, seperti digitalisasi layanan, keterlibatan masyarakat, dan program berbasis kearifan lokal (Ulfa & Frinaldi, 2025; Manar, 2025). Studi Hilmawan et al. (2023) menunjukkan bahwa inovasi sektor publik dapat meningkatkan kinerja pembangunan, meskipun hasilnya sangat bervariasi antar daerah. Penelitian Lim & Nursamsu (2024) menegaskan pentingnya difusi kebijakan inovatif antar daerah, terutama ketika sistem desentralisasi masih "tidak sempurna." Daerah sering meniru praktik sukses daerah lain, namun tanpa adaptasi terhadap konteks sosial dan ekonomi lokal, inovasi

tersebut gagal berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga refleksi dari kapasitas belajar institusional (Arif, 2024).

3. Kapasitas Institusional dan Pembelajaran Lokal

Kemampuan daerah untuk berinovasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, baik dari sisi sumber daya manusia, birokrasi, maupun tata kelola keuangan. Rosika et al. (2025) dan Wadipalapa (2024) menekankan bahwa desentralisasi membutuhkan reformasi kelembagaan untuk memastikan inovasi berjalan efektif di konteks lokal. Tanpa kapasitas institusi yang kuat, desentralisasi justru menimbulkan fragmentasi kebijakan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam kerangka teori governance learning, daerah yang memiliki sistem pembelajaran kebijakan lebih terbuka terhadap inovasi (Arif, 2024). Sebaliknya, daerah yang birokratis dan tertutup terhadap perubahan cenderung stagnan. Penelitian Fahlevy (2022) mendukung temuan ini, bahwa perbedaan kapasitas antardaerah menyebabkan inovasi tidak merata dan berkontribusi terhadap kesenjangan pelayanan publik.

4. Hubungan Inovasi dengan Kemandirian Daerah

Studi Sonoto (2025) menunjukkan hubungan positif antara kapasitas inovasi dan kemandirian keuangan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menegaskan bahwa inovasi bukan hanya instrumen peningkatan layanan, tetapi juga strategi menuju kemandirian fiskal. Namun demikian, studi Saksono (2025) menegaskan bahwa tanpa reformasi struktur fiskal nasional, inovasi keuangan daerah akan tetap terbatas karena pola transfer masih menimbulkan ketergantungan. Selain keuangan, inovasi dalam pelayanan publik juga memperkuat legitimasi lokal. Penelitian Ulfa & Frinaldi (2025) serta Hutauruk et al. (2020) menemukan bahwa inovasi berbasis kebutuhan masyarakat (citizen-driven innovation) mampu meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi layanan. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi dapat menjadi sarana bagi daerah untuk memperkuat posisi dalam sistem desentralisasi yang masih asimetris.

5. Ketergantungan Struktural: Antara Pengawasan dan Hambatan

Beberapa penelitian menyoroti bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat tidak sepenuhnya negatif. Dalam konteks tata kelola nasional, hubungan pusat-daerah juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan standardisasi kebijakan (Susilowati, 2016; Manar, 2025). Namun, ketika intervensi pusat terlalu dominan, ruang inovasi daerah menjadi terbatas (Rosika et al., 2025). Keterbatasan regulatif ini memperlihatkan adanya paradoks desentralisasi: daerah diberi kewenangan luas, tetapi dibatasi oleh sistem kontrol pusat yang ketat.

6. Sinergi Desentralisasi, Inovasi, dan Keberlanjutan

Penelitian Annahar (2023) serta Lim & Nursamsu (2024) menggarisbawahi pentingnya sinergi antara desentralisasi dan inovasi berkelanjutan. Desentralisasi yang inklusif harus mendorong partisipasi masyarakat lokal dan memastikan bahwa inovasi tidak berhenti pada proyek jangka pendek. Dalam konteks Indonesia, beberapa daerah telah menunjukkan praktik baik melalui integrasi inovasi digital, kearifan lokal, dan kebijakan adaptif (Hilmawan et al., 2023; Ulfa & Frinaldi, 2025). Rosika et al. (2025) menyimpulkan bahwa keberlanjutan inovasi pemerintahan lokal bergantung pada tiga pilar: kapasitas fiskal, dukungan kelembagaan, dan partisipasi publik. Tanpa ketiganya, desentralisasi hanya menghasilkan ilusi kemandirian dimana pemerintah daerah tetap terjebak dalam struktur ketergantungan pusat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya melahirkan kemandirian substantif bagi pemerintah daerah. Meskipun otonomi daerah memberi ruang bagi inovasi dan adaptasi kebijakan, pada praktiknya pemerintah daerah masih terikat oleh ketergantungan struktural terhadap pusat, terutama dalam hal fiskal dan regulatif. Kondisi ini menciptakan paradoks desentralisasi, di mana otonomi administratif tidak diikuti dengan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk berinovasi. Inovasi pemerintahan lokal muncul sebagai hasil dialektika antara kreativitas lokal dan kepatuhan terhadap struktur pusat, bukan semata sebagai konsekuensi langsung dari desentralisasi. Ke depan, pembangunan inovasi pemerintahan lokal memerlukan

keseimbangan antara kemandirian daerah dan dukungan adaptif dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang eksperimentasi dan fleksibilitas regulatif, sementara pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas institusional, kepemimpinan visioner, dan budaya inovatif. Dengan demikian, desentralisasi yang efektif bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan penciptaan ekosistem kolaboratif yang mendorong kreativitas, kepercayaan, dan keberlanjutan inovasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Annahar, N. (2023). *The road to inclusive decentralized village governance: Lessons from Indonesia*. *Sustainability*, MDPI.

Anwar, R. (2020). Inovasi Sektor Publik di Era Otonomi Daerah: Studi Kapasitas Pemerintah Lokal di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2), 123–137.

Arif, S. (2024). *Does decentralisation promote learning? Local political settlements and education policy in Indonesia*. *Journal of Education Policy*, Taylor & Francis.

Ariyanto, H., & Pribadi, A. (2025). Does Indonesian Fiscal Decentralization Lead to Local–Central Fiscal Dependency? Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 13(1), 45–59.

Dwiyanto, A. (2020). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Fahlevy, M. R. (2022). *Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik: Studi inovasi layanan di daerah*. *GovSci: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, FISIP Universitas Mulawarman.

Hilmawan, R., Purnamasari, D., & Abidin, Z. (2023). *Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia*. *Journal of Public Administration Research*, Elsevier.

Hutauruk, T., Marzuki, A., & Rachman, D. (2020). *Daya inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2).

Kuncoro, M. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 28(1), 23–38.

Lestari, D., & Nugraha, A. (2021). *Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Universitas Siliwangi.

Lex Localis. (2023). Local Government Capacity and Human Development in Southeast Asia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 21(4), 801–823.

Lim, D., & Nursamsu, S. (2024). *The spread of innovative policies in an imperfect decentralisation: Evidence from Indonesia*. *RISE Programme Working Paper*.

Mahsyar, A., & Iskandar, T. (2024). Fiscal Dependency and Local Government Innovation in Indonesia. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 12(2), 88–102.

Manar, D. G. (2025). *Evidence from Indonesian local government innovation: Digital public services and SPBE implementation*. *Atlantis Press: Prosiding Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah*.

Mulyadi, S., & Rachmawati, R. (2023). *Service innovation in local government: A case study of South Sulawesi districts*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Richtmann Publishing.

Nugroho, P. (2016). *Analisis atas kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah*. *Jurnal Keuangan Negara*, PKN STAN.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2022). Governance Innovation and Bureaucratic Transformation in the Era of Decentralization. Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik, 5(1), 15–33.

Rahman, N., Susilo, D., & Utami, R. (2023). Central–Local Relations and the Dynamics of Public Sector Innovation in Indonesia. Policy and Governance Review, 7(2), 120–134.

Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. International Review of Administrative Sciences, 47(2), 133–145.

Rosika, C., & Rahmawati, D. (2025). *Membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan: Antara inovasi dan kapasitas kelembagaan*. *Publikasi Indonesia*.

Rosika, C., Rahmawati, D., & Sulistyo, A. (2025). *Desentralisasi dan inovasi pemerintah: Membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan*. *Comserva: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Saksono, H. (2025). *Economic dimension of regional innovation in the era of fiscal decentralisation*. *Jurnal Kementerian Dalam Negeri*.

Simanjuntak, K. M. (2015). *Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia*. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Kementerian Dalam Negeri.

Smoke, P. (1996). *Fiscal decentralization in Indonesia: A review of concepts and consequences*. *World Development Journal*, 24(4), 687–705.

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sonoto, J. F. (2025). *Hubungan kapasitas inovasi terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah*. *ResearchGate*.

Susilowati, S. (2016). *Analisis proses strategi inovasi dari perspektif kapasitas daerah dan ketergantungan struktural*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI).

Sutrisno, E., & Darmawan, D. (2023). Kemandirian Fiskal Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Inovasi Pemerintahan Lokal di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara, 10(3), 201–219.

Tjiptoherijanto, P. (2019). *Decentralization in Indonesia: Looking for one nation*. *International Journal of Development Studies (IJDS)*.

Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). *Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik*. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*.

Wadipalapa, R. P. (2024). *An ambitious artificial intelligence policy in a decentralised context: Challenges and implications*. *Policy & Society*, SAGE Publications.